

Jokowi Dukung Adanya Aturan Baru yang Mengatur Platform Asing

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung adanya peraturan baru untuk mengatur perusahaan platform asing agar lebih tertata. Peraturan tersebut diharapkan membuat iklim kompetisi dengan industri pers di Indonesia menjadi lebih seimbang.

"Jadi yang disampaikan oleh pak ketua PWI maupun Prof Nuh tadi ada beberapa pilihan yang mungkin segera kita putuskan apakah segera mendorong UU baru atau yang kedua merevisi UU yang lama atau yang paling cepat adalah Peraturan Pemerintah atau PP. Ini kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan," kata Jokowi dalam acara puncak

peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 dari Istana Bogor, Rabu (9/2).

"Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan, apakah UU baru, apakah revisi UU lama atau memaknai PP," tambahnya.

Jokowi menegaskan dengan adanya aturan baru tersebut, diharapkan industri pers di Indonesia menjadi sehat dan kuat. Karena, kedaulatan informasi harus diwujudkan untuk bersama-sama dan perlu adanya ekosistem industri pers nasional yang sehat.

"Membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video asing," tegasnya. ● han

Pelapor KSAD Jenderal Dudung Penuhi Panggilan Puspomad

JAKARTA (IM) - Koliisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) memenuhi panggilan dari Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad), Rabu (9/2).

Mereka akan dimintai keterangan ihwal pelaporan dugaan penistaan agama yang ditujukan kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Faktanya berkas sudah diterima dan ada tanda terimanya itu secara hukum. Panggilan ini mungkin untuk investigasi atau kalifikasi, saya rasa seperti itu," ucap Kuasa Hukum Pelapor, Dama Hari Lubis, di Jakarta Pusat.

KUHAP APA dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah barang bukti yang nantinya disampaikan kepada Jenderal Dudung hingga transkrip wawancara.

"Ini bukti video dari Youtube, wawancara beliau dengan Deddy Cobuzier di menit

sekitar kami siapkan, terus kami buat potongan khusus objek perkara, kita bawa juga transkrip," ungkapnya.

Hari memaparkan, alasan kliennya melaporkan Jenderal Dudung. Di mana, yang bersangkutan merasa tersinggung jika Tuhan disamakan dengan makhluk.

"Pelapor sampaikan kepada kita dia itu merasa tersinggung Tuhan disamakan dengan makhluk, dia tersinggung," katanya.

Dibertakan sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman buka suara ihwal laporan yang dialamatkan kepadanya. Dia tak merasa terganggu oleh pelaporan tersebut.

Menurut dia, lantaran laporan itu hanya bentuk keterangan tertulis, maka dia telah memerintahkan Komandan Puspomad untuk meminta keterangan Koalisi itu secara langsung.

"Saya sampaikan ke Danpuspomad, silakan. Dilaporkannya kan tertulis, saya bilang kemarin, silakan datang," kata Dudung di Mabesad, Jakarta Pusat. ● han

2 Polhukam

FOTO:ANT



PIMPINAN KPK PERINGATI HARI PERS NASIONAL

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri (tengah) memberikan potongan kue kepada perwakilan jurnalis (kir) disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/2). Pimpinan KPK memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada awak media yang memiliki andil besar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dimandatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Jokowi Sebut Pembangunan IKN Baru Bagian dari Transformasi Ekonomi

Meski pembangunan IKN Nusantara diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun, namun, presiden, TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan berpindah ke ibu kota baru mulai 2024.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, program pembangunan ibu kota negara

(IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

Pmbangunan IKN baru tidak hanya pembangunan ekonomi saja, kata Jokowi,

tapi ia juga ingin memamerkan IKN sebagai bagian dari transformasi di bidang lingkungan, teknologi, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan.

"Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Mandiri Investment

Forum 2022 secara virtual, Rabu (9/2).

"IKN Nusantara akan kita jadikan showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lain, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, serta tata sosial yang toleran yang menjunjung tinggi etika publik," tuturnya.

Selain IKN, Jokowi juga ingin memamerkan kawasan industri hijau (green industrial park) yang tengah dibangun di Kalimantan Utara sebagai bagian dari transformasi ekonomi.

Ia mengatakan, pemerintah fokus melakukan pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai ekonomi berkelanjutan di berbagai bidang, mulai dari lingkungan, sosial, hingga pemerintahan.

"Secara bertahap beralih kepada sumber terbarukan untuk mewujudkan ekonomi hijau," ujarnya.

Jokowi mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ia mengaku bersyukur investasi dalam negeri tumbuh subur. Tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp 901 triliun atau tumbuh 9 persen secara year

on year dibanding tahun sebelumnya. Adapun penanaman modal asing tumbuh 10 persen secara year on year atau mencapai Rp 454 triliun.

Jokowi berharap angka ini terus naik seiring dengan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

"Pemerintah menjamin keamanan investasi bapak ibu dan saudara-saudara yang ditanamkan di Indonesia," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah berencana memulai pembangunan megaprojek Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada pertengahan 2022.

Meski pembangunan ini diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun, namun, presiden, TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan mulai berpindah ke ibu kota baru pada 2024.

Pada 18 Januari 2022 lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR. Hingga kini, UU itu masih menunggu tanda tangan dari presiden untuk selanjutnya diundangkan. ● han

Ketua DPRD Kota Bekasi Kembalikan Rp200 Juta Pemberian Pepen, KPK: Tetap Usut Unsur Pidananya

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mendalami unsur pidana terkait penerimaan uang Rp 200 juta oleh Ketua DPRD Bekasi Chairoman J Putro dari Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

Meski uang Rp 200 juta yang diduga terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi telah diserahkan ke KPK.

"Tim penyidik KPK akan melakukan analisa terhadap pengembalian uang yang dimaksud apakah di kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ataukah ada hal lain," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (9/2).

Ali mengatakan, pendalaman terhadap pengembalian uang itu dilakukan untuk mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada Chairoman termasuk gratifikasi atau suap. Jika gratifikasi, ujar dia, unsur pidananya akan hilang setelah Ketua DPRD Bekasi itu mengembalikan uang tersebut ke KPK.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan kemudian menghapus pidananya," jelas Ali.

Kendati demikian, jika analisa penyidik menunjukkan uang itu terindikasi ke dalam

suap yang menjerat Wali Kota Bekasi tersebut, maka KPK memastikan akan menindak lanjutinya.

"Tetapi kalau di dalam pengembalian tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan tentu tidak menghapus pidananya nanti akan dianalisa," tutur Ali.

Sebelumnya, Chairoman J Putro mengaku telah diberikan uang sebesar Rp 200 juta oleh Pepen – panggilan untuk Rahmat Effendi. Pengakuan itu disampaikan Chairoman usai diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (25/1).

"Jadi, tepatnya bukan menerima (Rp 200 juta), tapi diserahkan," kata Chairoman ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, (25/1) lalu.

Menurut Chairoman, awalnya dia tidak mengetahui total uang yang diberikan oleh Pepen. Namun, akhirnya uang itu diserahkan ke penyidik KPK usai Wali Kota nonaktif Bekasi tersebut ditangkap KPK.

"Awalnya kita enggak tahu berapa jumlahnya (uang dari Pepen) sehingga dihitung langsung oleh petugas KPK, dan mereka menghitungnya sebesar Rp 200 juta," jelas Ketua DPRD itu.

Kendati demikian, Chairoman tetap mengaku tidak mengetahui maksud peny-

arahan uang dari Rahmat Effendi kepadanya. Uang yang diserahkan tersebut, ujar dia, diberikan melalui perpanjangan tangan Rahmat Effendi bernama Luthfi.

"Enggak tahu (peruntukan uang tersebut), karena penerimaan juga diserahkan sambil lalu, dan (kepanjangan tangan Pepen) tidak memberikan penjelasan apapun," tutur Chairoman.

Dalam kasus ini, Pepen diduga telah menerima ratusan juta rupiah dari hasil minta "uang jabatan" kepada pegawai Pemerintah Kota Bekasi. KPK juga menduga Pepen menggunakan banyak cara untuk memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dari sejumlah pihak swasta.

Dalam suap proyek pengadaan lahan, misalnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi diduga jadi menjadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 4 miliar dari pihak swasta. Lalu, Camat Jatisampurna Wahyudin diduga jadi perpanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 3 miliar dari Camat Rawalumbu Makhfid Saifudin.

Wahyudin juga diduga menerima Rp 100 juta, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi. ● han

Bupati Tanjung Jabung Timur Diperiksa Terkait Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tanjung Jabung Timur, H Romi Hariyanto, Rabu (9/2). Romi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap ketok palu atau pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017.

Selain Romi Hariyanto, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya yakni, Ibu Rumah Tangga (IRT), Dana Indriyana Heumasse dan Karyawan Swasta, Hanna Francisca. Keterangan mereka untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Apit Firmansyah (AF).

"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AF," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (9/2).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ketok palu terkait pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi,

Zumi Zola.

Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemprov Jambi lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Bahkan, anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan.

Saat ini, tinggal lima terdakwa yang masih akan menjalani proses persidangan atas kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Empat dari lima terdakwa itu yakni mantan anggota DPRD Jambi. Sementara satu terdakwa lainnya seorang pengusaha.

Terbaru, KPK mengembangkan perkara yang berkaitan dengan Zumi Zola ini dengan menetapkan satu tersangka dari pihak swasta. Adalah Apit Firmansyah yang disebut-sebut orang kepercayaan Zumi Zola.

Apit ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Jambi. ● mei



AKSI DAMAI HARI PERS NASIONAL

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Tangerang menggelar aksi damai memperingati Hari Pers Nasional 202 di halaman Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Rabu (9/2). Mereka menyerukan penghentian kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan.

KPK Latih 400 ASN Banten Jadi Penyuluh Antikorupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih calon penyuluh antikorupsi bagi aparat sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten tahun 2022.

Kegiatan itu akan diikuti 400 ASN yang merupakan guru dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, lembaga antirasuah itu tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat terutama para penyuluh antikorupsi.

"Kami menilai peran penyuluh antikorupsi sangat besar dan memiliki peran strategis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing," ujar Lili, melalui keterangan tertulis, (9/2).

Lili mengatakan, penyuluh antikorupsi merupakan "kepanjangan tangan" KPK dalam menjangkau seluruh penjurur negeri. Posisi KPK yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, ujar dia, ti-

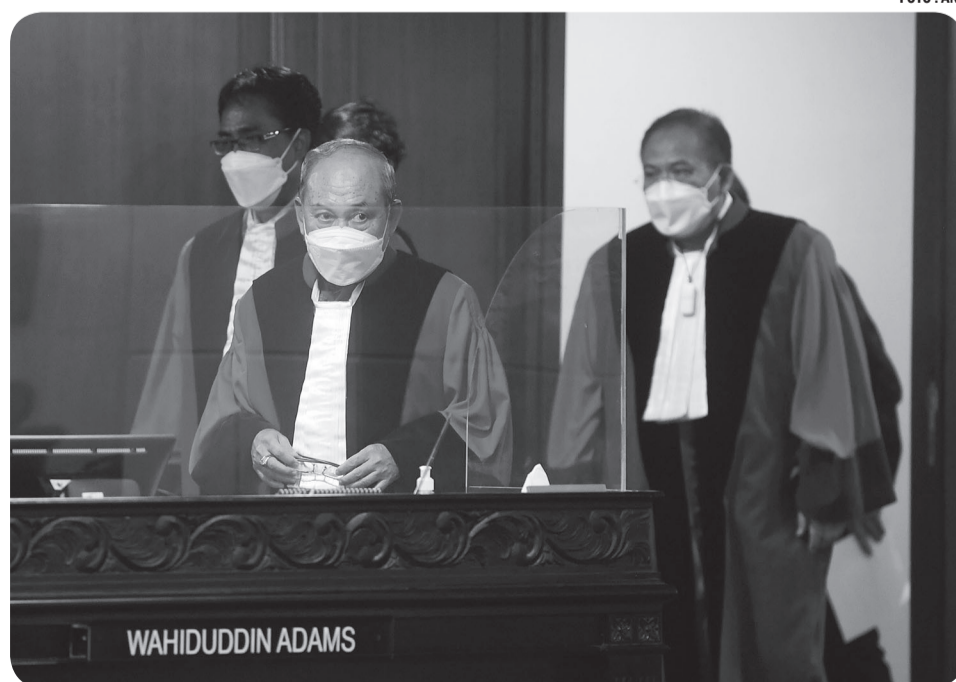
tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia untuk membangun budaya antikorupsi.

"Penyuluh antikorupsi dapat menjadi 'kepanjangan tangan' KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat" papar Lili.

Para penyuluh antikorupsi ini dapat menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang lebih efektif dan efisien di satuan pendidikan masing-masing. Apalagi, 400 ASN itu terdiri dari sektor pendidikan yang berposisi sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Adapun kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten.

Untuk mendukung Perhubungan itu, KPK akan terus melatih agen-agen perubahan melalui pelatihan sesuai dengan SKKNI Nomor 303 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) penyuluh antikorupsi. ● mei



UJI MATERIIL UU PEMILU

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (tengah) bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Hakim Konstitusi Aswanto (kanan) berjalan memasuki ruang sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Jakarta, Rabu (9/2). Sidang beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

PENGUMUMAN

Para Pemegang Saham PT MARI WISATA TRAVEL, sebuah perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah menyetujui untuk menurunkan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan.

Kepada pihak yang berkeberatan, mohon dapat disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak pengumuman ini, ditujukan ke alamat Perseroan sebagaimana berikut:

PT MARI WISATA TRAVEL
Ged. Plaza Kaha Lt 4 Ruang 401B,
Jl KH. Abdullah Syafei No 20 A,
Kec. Bukit Duri, Kec. Tebet,
Kota Jakarta Selatan 12840
Tlp : 021 83703688

Demikian pengumuman ini dilakukan, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 10 Februari 2022
Direksi
PT MARI WISATA TRAVEL

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPTT"), Direksi PT Catur Langgeng Bersama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan dan memberitahukan kepada semua kreditor Perseroan bahwa berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 9 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan antara lain telah memutuskan untuk menyetujui pengurangan modal Perseroan, sehingga setelah efektif, struktur modal Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.
2. Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seibu) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPTT, dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kreditor dapat mengajukan keberatan atas pengurangan modal tersebut secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2022
Direksi PT Catur Langgeng Bersama